



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM  
BALAI PELATIHAN LHK MAKASSAR

SDM LHK UNGGUL  
UNTUK INDONESIA TANGGUH,  
INDONESIA TUMBUH

# LAPORAN KINERJA 2023

BALAI PELATIHAN LHK MAKASSAR

HAPPY  
EASY  
PROFESSIONAL



Scan this QR Code

<http://bdlhkmakassar.bp2sdm.menlhk.go.id>

Follow sosial media kami :

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,  
Harmonis, dan Berkeadilan

**#bangga  
melayani  
bangsa**



Balai Pelatihan LHK  
Makassar



bplhkmakassar



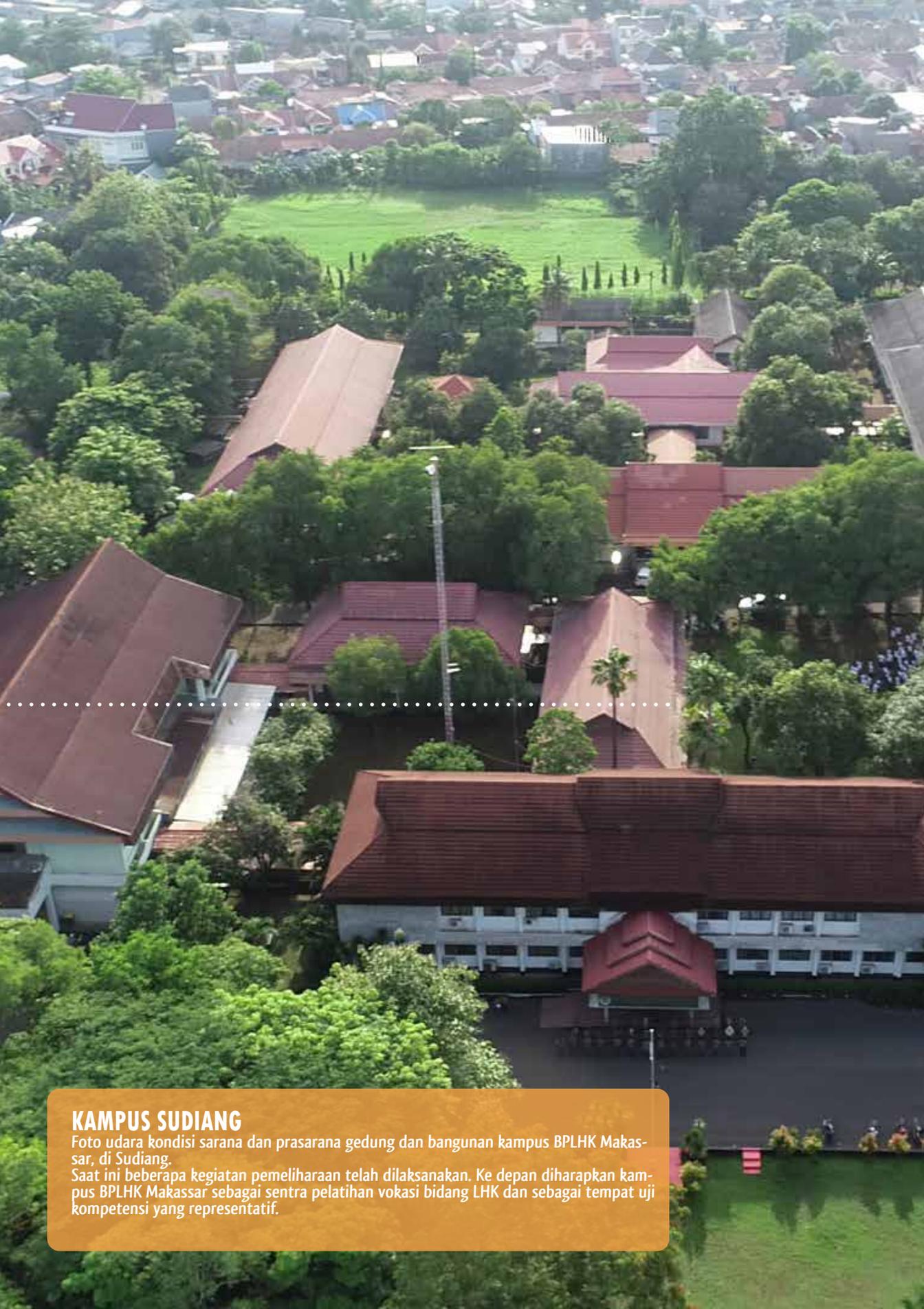


BALAI PELATIHAN LHK MAKASSAR

# LAPORAN KINERJA 2023

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**



## KAMPUS SUDIANG

Foto udara kondisi sarana dan prasarana gedung dan bangunan kampus BPLHK Makassar, di Sudiang.

Saat ini beberapa kegiatan pemeliharaan telah dilaksanakan. Ke depan diharapkan kampus BPLHK Makassar sebagai sentra pelatihan vokasi bidang LHK dan sebagai tempat uji kompetensi yang representatif.



## PENGARAH

Evi Budiaryanti  
Muhammad Arif Muhammadiyah

## TIM PENYUSUN

Muhammad Arif Muhammadiyah  
Musmirah Idris  
Ayu Wahyuni  
Silvana Arsyad  
Maria Klara Dhika AU  
Mirawati

## DESAIN & TATA LETAK

Aidil Akbar

Alamat:

Balai Pelatihan LHK Makassar  
Jl. Perintis Kemerdekaan  
Km. 17,5 Sudiang, Makassar  
Telp.554875, Fax. 554535  
email : bdkmksr@gmail.com



## PEMANFAATAN HHBK

Foto udara salah satu aktifitas masyarakat di KHDTK Diklat Kehutanan Tabo - Tabo yakni pemanfaatan HHBK Madu Hutan.

# DAFTAR ISI

- ii DAFTAR ISI
- iii DAFTAR GAMBAR DAN TABEL
- iv KATA PENGANTAR
- v EXECUTIVE SUMMARY

- 1** BAB I : PENDAHULUAN
  - A. Dasar Hukum
  - B. Tugas Pokok dan Fungsi
  - C. Struktur Organisasi
  - D. SDM Penunjang

- 7** BAB II : PERENCANAAN KINERJA
  - Renstra 2020- 2024
  - Rencana Kerja 2023
  - Perjanjian Kinerja 2023

- 14** BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA
  - A. REVIU ATAS DOKUMEN PERENCANAAN
  - B. REVIU ATAS EVALUASI SAKIP BP2SDM
  - C. METODE PENGUKURAN
  - D. HASIL PENGUKURAN KINERJA
  - E. REALISASI ANGGARAN

- 33** BAB IV : PENUTUP

- 36** LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Hal.

- |           |   |
|-----------|---|
| <b>8</b>  | Tabel 1. Matriks Rentsra 2020 -2024   |
| <b>10</b> | Tabel 2. Matriks Renja 2023   |
| <b>12</b> | Tabel 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023  |
| <b>14</b> | Tabel 4. Realisasi Kinerja 2023   |
| <b>18</b> | Tabel 5. Realisasi Perjanjian Kinerja 2023  |
| <b>20</b> | Tabel 6. Efektivitas Kinerja  |
| <b>20</b> | Tabel 7. Efisiensi Kinerja  |
| <b>21</b> | Tabel 8. Capaian Kinerja  |
| <b>23</b> | Tabel 9. Penyelenggaraan Pelatihan  |
| <b>24</b> | Tabel 10. Realisasi Kerjasama Pelatihan   |
| <b>27</b> | Tabel 11. Realisasi penyelenggaraan bimbingan teknis pengembangan generasi lingkungan hidup dan kehutanan pada Tahun 2023 |
| <b>30</b> | Tabel 12. Alokasi Anggaran berdasarkan Rincian Output   |
| <b>30</b> | Tabel 13. Alokasi Anggaran berdasarkan Jenis Belanja  |

## DAFTAR GAMBAR

Hal.

- |           |   |
|-----------|---|
| <b>4</b>  | Gambar 1. Tugas Pokok dan Fungsi BPLHK Makassar             |
| <b>5</b>  | Gambar 2. Struktur Organisasi BPLHK Makassar                |
| <b>6</b>  | Gambar 3. SDM Penunjang                                     |
| <b>31</b> | Gambar 4. Grafik Capaian Kinerja                            |
| <b>31</b> | Gambar 5. Grafik Capaian Kinerja berdasarkan Rincian Output |



## KATA PENGANTAR

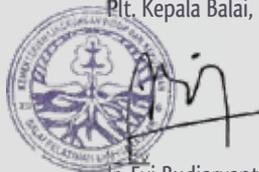
Laporan Kinerja Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar (BPLHK Makassar) Tahun 2023 disusun sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan atas kinerja pencapaian Perjanjian Kinerja, Rencana Sasaran Strategis Tahun 2020 - 2024 sekaligus pencapaian target rencana kerja (Renja) Tahun 2023. Laporan kinerja ini merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis BPLHK Makassar 2020 - 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja BPLHK Makassar mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas organisasi dalam pemakaian sumber daya untuk menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi. Laporan ini juga berfungsi sebagai alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan BPLHK Makassar. Secara Umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kami berharap laporan ini memenuhi harapan setiap pemangku kepentingan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 15 Januari 2023

Plt. Kepala Balai,



Ir. Evi Budiaryanti, M.Si.

NIP : 19681010 199303 2 002

## EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Kinerja BPLHK Makassar Tahun 2023 disusun sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan atas kinerja pencapaian target Renja Tahun 2023, dan pencapaian tahun ke-4 sasaran strategis 2020-2024. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas organisasi dalam pemakaian sumber daya untuk menjalankan Tupoksi. Laporan ini juga berfungsi sebagai alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan BPLHK Makassar. Secara Umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Jumlah kapasitas SDM aparatur dan non aparatur yang meningkat kapasitasnya dengan capaian kinerja sebesar 100 persen dari target 243 orang melalui penyelenggaraan pelatihan dengan sumber dana DIPA BPLHK Makassar. Selain melalui sumber dana DIPA BPLHK Makassar, pelatihan juga dilaksanakan dengan menggunakan skema kerjasama atau jaminan mutu Pelatihan. Pelatihan melalui skema ini terealisasi sebanyak 9 orang melalui kerjasama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat.

Indikator kinerja kedua dalam perjanjian kinerja adalah Nilai KHDTK yang Dikelola sebesar 69 poin. Setelah dilakukan validasi oleh tim penilai KHDTK pada Pusat Pelatihan SDM LHK melalui *self assesment* secara kuantitatif

tercapai 101,69 persen yakni 70,17 poin.

Realisasi kegiatan ini berupa Penyusunan RPHJPD KHDTK Tahun 2024, Penyusunan SOP/Desain Tapak Pemanfaatan Jasa Lingkungan; Pengembangan Sarana Pelatihan Bidang Eco-Edutourism dan Pusat Informasi KHDTK, Pemeliharaan KHDTK Pelatihan Kehutanan Bersama Masyarakat, Sarana Pemeliharaan Satwa Dan Dome Kupu-Kupu, Sarana Demplot Rehabilitasi dan KTA, Pemanfaatan Sarana Produksi Gula Semut dan Jamur Tiram Bersama Masyarakat, Pengembangan Kerjasama Pengelolaan KHDTK, Pengembangan Kegiatan Kaji Widya, Pemeliharaan Batas Blok dan Petak, Perlindungan dan Pengamanan KHDTK Bersama Masyarakat, Penyuluhan dan Peningkatan Peran Masyarakat Sekitar KHDTK, Penguatan Kapasitas Kelompok Tani Hutan, Administrasi dan pelaporan, Monev dan pelaporan.

Indikator kinerja ketiga adalah SDM yang berorientasi wirausaha kreatif bidang lingkungan hidup dan kehutanan pada lembaga masyarakat dan komunitas sejumlah 30 orang. Pencapaian kinerja ini dilakukan melalui kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat dalam Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang dalam 1 angkatan. Capaian indikator kinerja ketiga ini telah sesuai



dengan target yang telah ditetapkan yaitu 30 orang atau 100 persen.

Secara umum pencapaian indikator kinerja kegiatan BPLHK Makassar tahun 2023 secara kuantitatif mencapai 100 persen dengan realisasi keuangan sebesar 99,98 persen. Capaian kinerja BPLHK Makassar ini dicapai secara efisiensi dan efektif. Capaian ini tentu sangat memuaskan ditengah tengah keterbatasan anggaran. Kegiatan BPLHK Makassar pada tahun 2023 berfokus pada jenis-jenis pelatihan yang mendukung prioritas nasional dan pelatihan vokasi.

Pelajaran penting dari penyelenggaraan pelatihan pada tahun 2023 adalah pelatihan lebih banyak dilaksanakan dengan metode klasikal onsite khususnya pelatihan vokasi. Metode ini merupakan bentuk adaptasi terhadap anggaran yang terbatas dengan memanfaatkan jejaring pada stakeholder di wilayah layanan. Selain itu, metode ini juga lebih relevan dengan kebutuhan para peserta langsung mengingat jenis pelatihan yang dilaksanakan merupakan pelatihan berbasis wirausaha kreatif. Metode ini lebih produktif dalam arti BPLHK Makassar dapat langsung terjun di lapangan mendengar aspirasi, menembus sekat geografis antara pengajar dan peserta, serta memahami kebutuhan dan potensi langsung kaitannya dengan wirausaha kreatif.



*Bimtek pengelolaan ekowisata yang ditujukan kepada KTH Deswita binaan BPLHK Makassar*

Foto : Aidil (2023)

# BAB 1

## PENDAHULUAN

**B**irokrasi yang berintegritas dan memiliki budaya melayani, sangat dibutuhkan untuk mewujudkan program-program pembangunan yang strategis yang berdampak besar bagi masyarakat. Birokrasi juga merupakan alat utama dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan karena berfungsi untuk menerjemahkan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan publik serta untuk menjamin pelaksanaan kebijakan tersebut secara operasional, terutama dalam memberikan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

Oleh karena itu, birokrasi menjadi faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda negara dan pemerintahan dalam kerangka upaya merealisasikan sebuah tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Sejumlah komponen penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan integritas. Tata kelola pemerintahan yang baik tentunya dimulai dari aparat pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan *good governance* sesuai yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 29 Tahun 2010, Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik dan Rencana Kerja Tahunan yang ditetapkan oleh unit kerja.

Tugas pokok dan fungsi Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar (BPLHK Makassar) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, bahwa BPLHK Makassar mempunyai tugas melaksanakan pelatihan aparaturnya dan non aparaturnya di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPLHK Makassar terus berupaya meningkatkan kinerja sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan, sejalan dengan prioritas nasional, dan sesuai kebutuhan stakeholders di wilayah layanan. Tidak hanya mampu memenuhi kinerja secara kuantitatif, namun juga BPLHK Makassar terus berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan sesuai dengan standar mutu atau akreditasi. Pencapaian kinerja BPLHK Makassar ini menjadi bagian dalam upaya pencapaian kinerja organisasi induk yakni kinerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang pada akhirnya juga kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja BPLHK Makassar Tahun 2023 adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Kehutanan, Perikanan, dan Kehutanan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah RI No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK;
15. Peraturan Menteri LHK Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri LHK Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 - 2024;
16. Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM;
17. Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Tahun 2020-2024;
18. Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Nomor SK.29/BP2SDM/SET.11/REN.0/12/2022 tentang Rencana Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Tahun 2023;
19. Surat Keputusan Kepala Balai Pelatihan LHK Makassar Nomor 05 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BPLHK Makassar Nomor 61 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPLHK Makassar Tahun 2020-2024;
20. Surat Keputusan Kepala Balai Pelatihan LHK Makassar Nomor SK.46/BPLHK- 6/TU/REN.0/12/2022 tentang Rencana Kerja Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar tahun 2023;



Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, bahwa BPLHK Makassar mempunyai tugas melaksanakan pelatihan aparatur dan non aparatur bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran pelatihan;
2. Pelaksanaan pelatihan;
3. Pelaksanaan kerjasama pelatihan;
4. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan

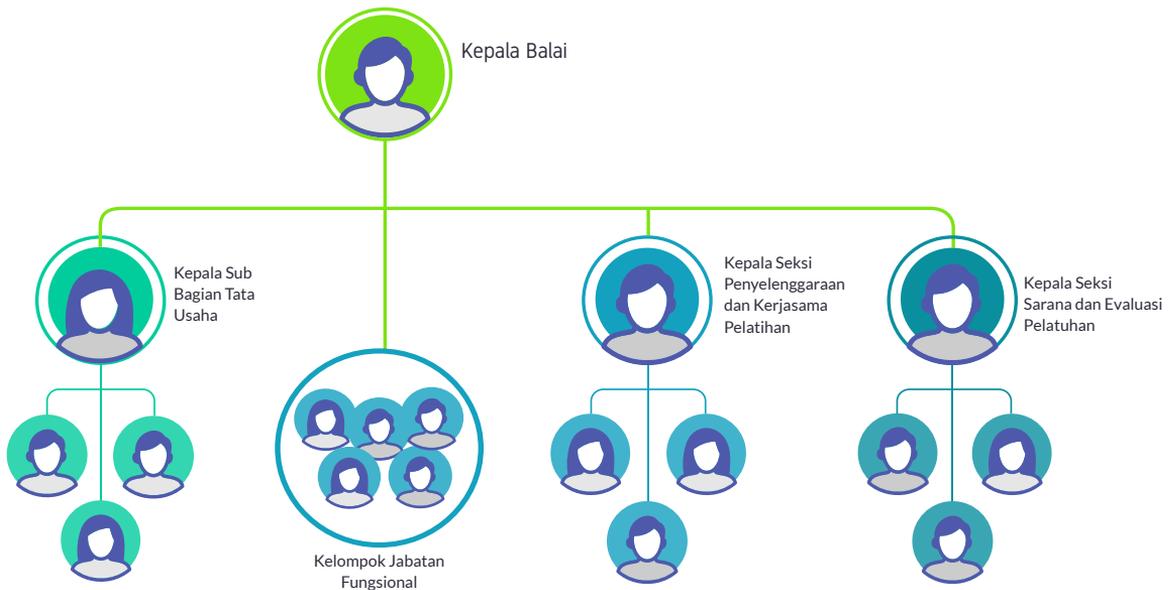
prasarana pelatihan;

5. Pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk pendidikan dan pelatihan;
6. fasilitasi pelaksanaan penilaian kompetensi;
7. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelatihan; dan
8. Pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, dan-pengelolaan data dan informasi.



Gambar 1 : Tugas Pokok dan Fungsi BPLHK Makassar

## C. STRUKTUR ORGANISASI



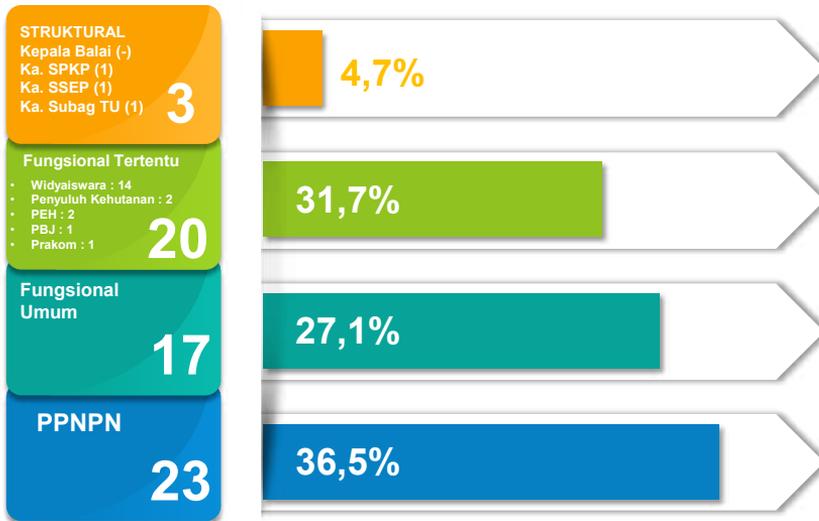
Gambar 2 : Ilustrasi Struktur Organisasi BPLHK Makassar

Struktur organisasi BPLHK Makassar terdiri atas Kepala Balai yang merupakan pejabat eselon III dengan dibantu 3 (tiga) pejabat eselon IV, yaitu: (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, (2) Kepala Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Pelatihan dan (3) Kepala Seksi Sarana dan Evaluasi Pelatihan. Selain itu juga dibantu oleh kelompok jabatan fungsional. Jabatan Fungsional terdiri atas Widyaiswara, Penyuluh Kehutanan, Pengendali Ekosistem Hutan dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan; urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat; dan pengelolaan data dan informasi. Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Pelatihan mempunyai tugas melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan; penyusunan rencana pelatihan; penyelenggaraan pelatihan; dan kerja sama pelatihan.

Seksi Sarana dan Evaluasi Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana pelatihan; pengelolaan hutan pendidikan dan pelatihan; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelatihan; fasilitasi pelaksanaan penilaian kompetensi; dan pelayanan data dan informasi pelatihan.

63 orang



Gambar 3.  
Jumlah SDM pada BPLHK Makassar per Desember 2023

Sumber daya manusia (SDM) merupakan modal dasar dalam pembangunan, khususnya dalam upaya pencapaian target kinerja penyelenggaraan tupoksi BPLHK Makassar. Jumlah pegawai BPLHK Makassar per 31 Desember 2023 adalah 63 orang, yang terdiri 36 orang PNS, 3 orang PPPK, dan 23 orang PPNPN. Permasalahan kualitas dan distribusi pegawai BPLHK Makassar yang timpang masih menjadi titik perhatian. Upaya - upaya peningkatan kapasitas SDM yang ada terus dilakukan agar mendorong bekerja lebih produktif dalam upaya akselerasi pencapaian kinerja organisasi.

Tenaga pengajar/widyaiswara di BPLHK Makassar berjumlah 14 orang atau 22 persen dari total pegawai BPLHK Makassar atau 28,8 persen dari total SDM, dimana widyaiswara (WI) ini merupakan bagian dari SDM BPLHK Makassar yang mempunyai kualitas yang relatif baik, dimana semuanya mempunyai jenjang pendidikan S2 dan S3 serta mempu-

nyai distribusi struktur usia yang produktif. Sehingga kelompok WI ini menjadi harapan untuk menjadi tulang punggung, dan motor penggerak pencapaian kinerja BPLHK Makassar khususnya dalam penyelenggaraan pelatihan LHK, serta perubahan pola pikir di BPLHK Makassar ke arah peningkatan produktivitas.

Menyadari titik lemah tersebut, BPLHK Makassar peduli untuk melakukan peningkatan kapasitas SDM yang dimilikinya. Selain itu juga mengembangkan sinergitas secara internal antar seksi, dan secara eksternal melalui sinergitas dengan stakeholders, antara lain dengan SMKK Negeri Makassar, SMKK Widya Nusantara Makassar, dan UPT KLHK dan instansi pemerintah daerah di wilayah layanan. Sinergitas dan kolaborasi menjadi kunci keberhasilan organisasi.

## BAB 2

# PERENCANAAN KINERJA

### A. RENSTRA 2020 - 2024



Rencana Strategis BPLHK Makassar Tahun 2020 - 2024 disusun berdasarkan Renstra Badan P2SDM Tahun 2020 - 2024 yang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 - 2024. Rencana strategis diperlukan dalam upaya efektifitas dan efisiensi pencapaian sasaran atau target kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dicapai selama 5 tahun. Rencana Strategis yang disusun untuk digunakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan instansi. Dalam rencana strategis

tersusun program atau kegiatan, sasaran dan target indikator kinerja atau indikator keberhasilan, serta tata waktu pelaksanaannya dalam periode lima tahun. Indikator kinerja pada level organisasi mandiri eselon 3 (Unit Pelaksana Teknis) disebut indikator kinerja kegiatan (IKK). IKK ini digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan. Matriks Renstra Balai Pelatihan Makassar Tahun 2020 - 2024 dapat di lihat pada Tabel 1.

**HAPPY**

**EASY**

**PROFESSIONAL**

Tabel 1 :  
Matriks Renstra 2020 - 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Output/Komponen	Satuan	TARGET Alokasi Pendanaan					Alokasi Pendanaan (Rp Ribu)														
				2020	2021	2022	2023	2024	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024										
Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM																							
I. Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur																							
Peningkatan kompetensi dan Sertifikasi SDM LHK	01. Meningkatkan Kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kesehatan	1 Lulusan Diklat Non Aparatur LHK	Orang	489	494	120	60	120	662.000	410.790	360.000	275.000	360.000										
		2 Lulusan diklat aparatur																					
		1. Diklat Teknis dan Fungsional	Orang	300	30	30	30	60	593.740	130.000	140.000	155.000	300.000										
		2. Diklat Administrasi	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		3. Diklat Kepemimpinan	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		3 Jumlah lulusan pelatihan vokasi bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha																					
		- Pelatihan Vokasi																					
		a. Pelatihan Vokasi tenaga teknis bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha	Orang	-	204	90	120	150	-	129.210	270.000	480.000	500.000										
		4 SDM Masyarakat yang terlatih dalam Pengelolaan lingkungan hidup dan Kesehatan																					
		Pelatihan Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup dan Kesehatan	Orang	150	120	30	30	60	360.000	240.000	90.000	75.000	120.000										
02. Meningkatkan efektifitas																							
1 Indeks efektifitas pengelolaan KHDTK - Nilai KHDTK yang dikelola	Poin	72	73	74	75	76	620.000	485.000	382.000	375.000	400.000												

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Output/Komponen	Satuan	TARGET Alokasi Pendanaan					Alokasi Pendanaan (Rp Ribu)									
				2020	2021	2022	2023	2024	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024					
	pengelolaan KHDTK	a. Pengembangan KHDTK sebagai sarana Pengembangan Diklat																
<b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan P2SDM</b>																		
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik sesuai kerangka reformasi dan birokrasi pada unit Badan P2SDM	1 Layanan Dukungan Manajemen pada Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan a. Penyusunan rencana Program, dan penyusunan Rencana Anggaran b. Pelaksanaan Pemantuan dan Evaluasi	Layanan	1	1	1	1	1	1	71.060	125.000	-	-	-	-	-	-	-
		2 Layanan Perkantoran a. Gaji dan Tunjangan b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	1	1	1	1	1	1	11.980.000	9.675.000	9.182.300	9.498.158	9.498.158				
		3 Layanan Sarana dan Prasarana Internal a. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi b. Pengadaan peralatan fasilitas Perkantoran c. Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	Layanan	1	1	1	1	1	1	351.000	39.312	88.000	330.000	500.000				
		4 Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1	1	-	-	100.000	100.000	100.000				

Rencana Kerja BPLHK Makassar Tahun 2023 disusun berdasarkan Rencana Strategis BDLHK Makassar 2020-2024 yang memuat program dan kegiatan, indikator kinerja, target, dan alokasi anggaran dari setiap jenis kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023. Secara terinci Rencana Kerja BPLHK Makassar Tahun 2023 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 : Matriks Rencana Kerja 2023

Program	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Target	Anggaran (ribu rupiah)	Indikator Kinerja Kegiatan
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia LHK	(CAG) Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup	Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat	1 Unit	375.000	Nilai KHDTK yang dikelola
		(DCE) Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pelatihan SDM Aparatur LHK yang ditingkatkan	30 Orang	120.000	Lulusan diklat aparatur LHK
		(SCE) Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang ditingkatkan	60 Orang	240.000	Lulusan diklat non aparatur LHK
			Pelatihan Vokasi tenaga teknis bidang LHK yang berorientasi Industri dan wirausaha	153 Orang	480.000	Jumlah lulusan pelatihan vokasi bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha
	Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(BDC) Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	SDM yang Berorientasi Wirausaha Kreatif Lingkungan Hidup dan Kehutanan	30 Orang	75.000	Jumlah SDM yang Berorientasi Wirausaha Kreatif Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM	(EBA) Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Umum	1 Layanan	90.000	1. Nilai SAKIP BP2SDM 2. Level Maturitas SPIP 3. Opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian LHK
			Layanan Perkantoran	1 Layanan	9.095.424	
		(EBB) Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Sarana Internal	1 Unit	330.000	



Perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi/lembaga. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur capaian pelaksanaan kinerja Instansi Pemerintah. Adapun tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk: (1) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; (2) sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (3) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (4) menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan (5) sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Secara umum, perjanjian kinerja memuat sasaran, indikator kinerja kegiatan, target kinerja dan alokasi anggaran sesuai DIPA BPLHK Makassar Tahun Anggaran 2023 dengan nomor SP DIPA-029.08.238073/2023 tanggal 30 November 2022. Perjanjian Kinerja BDLHK Makassar tahun 2023 dapat di lihat pada Tabel 3.

Tabel 3 : Perjanjian Kinerja 2023

No. (1)	Kegiatan (2)	Sasaran Kegiatan (3)	Indikator Kinerja Kegiatan (4)	Target (5)
1.	Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia LHK	Meningkatnya Kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Lulusan Diklat Aparatur LHK	30 orang
2.			Lulusan Diklat Non Aparatur LHK	60 orang
3.			Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha	153 orang
4.		Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Diklat Kehutanan	Nilai KHDTK yang Dikelola	69 poin
5.	Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Terbentuknya SDM yang berorientasi wirausaha kreatif bidang lingkungan hidup dan kehutanan	Jumlah SDM yang Berorientasi Wirausaha Kreatif Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Lembaga Masyarakat dan Komunitas	30 orang



## PENGHARGAAN KPPN

BPLHK Makassar meraih penghargaan sebagai Satker dengan capaian IKPA terbaik periode Triwulan II Tahun 2023 Kategori DIPA Pagu Kecil sampai dengan 30 Milyar.

Foto : Aidil, 2023



## BAB 3

# AKUNTABILITAS KINERJA

### A. REVIU ATAS DOKUMEN PERENCANAAN

Pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 BPLHK Makassar awal tahun memuat DIPA sebesar Rp11.213.158.000,- mengalami penyesuaian sesuai Surat Kepala Badan P2SDM Nomor : S.154/P2SDM/SET.11/KEU.0/10/2023 Tanggal 11 Oktober 2023 perihal Penyesuaian Pagu Belanja Lingkup Badan P2SDM Tahun 2023. Setelah penyesuaian *automated adjustment*, pagu BPLHK Makassar turun menjadi Rp10.805.424.000,-. Jenis belanja yang berkurang adalah belanja pegawai sebagai antisipasi pagu minus belanja pegawai lingkup BP2SDM.

Sedangkan untuk IKK pada tahun 2023 juga mengalami perubahan dari semula 240 orang target, menjadi 273 orang. Pada RO Lulusan pelatihan vokasi bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha adalah output yang berubah, sedangkan output lain diangka yang sama dengan Renja awal. Perubahan ini dikarenakan BPLHK Makassar melaksanakan pelatihan dengan skema kerjasama pelatihan yakni pelatihan Ganis PHPL yang dilaksanakan pada bulan Juni 2023. Sebanyak 33 orang peserta mengikuti 3 pelatihan tenaga teknis. Rincian perubahan IKK dapat dilihat pada tabel 4 dibawah.

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Awal	Target Revisi
1	Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia LHK	Lulusan Diklat Aparatur LHK	Orang	30	30
2		Lulusan Diklat Non Aparatur LHK	Orang	60	60
3		Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha	Orang	120	153
4		Nilai KHDTK yang dikelola	Poin	69	69
5	Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah SDM yang berorientasi wirausaha kreatif bidang lingkungan hidup dan kehutanan pada lembaga masyarakat dan komunitas	Orang	30	30

Tabel 4 :  
Perubahan IKK selama 2023

## B. REVIU ATAS EVALUASI SAKIP BP2SDM

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja. Kementerian LHK telah menerapkan eSAKIP. Dalam pelaksanaannya Tahun 2023, BPLHK Makassar mendapatkan Nilai 75,76 dengan Predikat Sangat Baik (BB).

Adapun beberapa indikator penilaian dan bobot yang diraih adalah sbb:

1. Perencanaan Kinerja dengan Bobot 25,18 dari bobot maksimal 30
2. Pengukuran Kinerja dengan Bobot 23,73 dari bobot maksimal 30
3. Kinerja Pelaporan dengan Bobot 9,38 dari bobot maksimal 15
4. Evaluasi Internal dengan Bobot 17,45 dari bobot maksimal 25

Untuk perencanaan kinerja, BPLHK Makassar ditemukan kekurangan yakni mencantumkan RO sebagai IKK. Oleh karenanya, ke depan akan menjadi perhatian dalam setiap penyusunan pelaporannya. Dalam hal pengukuran kinerja, perubahan dan revisi atas anggaran masih belum terdokumentasi dengan baik. Hal ini menjadi salah satu catatan perubahan ke depan dengan mendokumentasikan setiap kegiatan terkait pengelola DIPA, perencanaan dan pelaporan. Hal ini yang membuat bobot yang diperoleh pada eSAKIP tidak mencapai nilai maksimal.

Di tahun 2024 diharapkan seluruh kegiatan yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal mulai didokumentasikan baik berupa undangan maupun notulensi hasil rapat, dan data-data hasil revisi maupun rencana revisi yang dijadwalkan secara periodik.



## Metode pengukuran Capaian Kinerja Tahun Berjalan sesuai PK

Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program yang ditetapkan dalam mewujudkan tujuan instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja. Semakin tinggi realisasi kinerja, semakin baik pencapaian indikator kinerja. Rumus pengukuran kinerja adalah:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

## Metode pengukuran Efektivitas dan Efisiensi

Pengukuran efektivitas capaian kinerja kegiatan tahun 2023 dilakukan melalui perbandingan dengan capaian kinerja tahun 2022. Dari hasil perbandingan tersebut dapat diketahui kemajuan efektivitas pelaksanaan kinerja kegiatan yang dilaksanakan tahun 2023. Apabila rasio yang dihasilkan lebih besar 1 (satu) terjadi peningkatan, jika rasio yang dihasilkan sama dengan 1 maka efektifitas capaian kinerja tahun berjalan dibandingkan tahun sebelumnya adalah tetap atau sama dengan tahun sebelumnya dan apabila rasio yang dihasilkan lebih kecil 1 menunjukkan efektivitas capaian kinerja sasaran menurun.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\% \text{ Fisik 2023}}{\% \text{ Fisik 2022}} \times 100\%$$

Pengukuran efisiensi capaian kinerja tahun 2023 dilakukan melalui perbandingan antara capaian kinerja (fisik) dengan pelaksanaan anggaran tahun 2023. Dari hasil perbandingan tersebut dapat diketahui efisiensi capaian kinerja sasaran yang dilaksanakan pada tahun 2023 Apabila rasio yang dihasilkan lebih besar atau sama dengan 1 maka pelaksanaan capaian sasaran termasuk katagori efisien. Apabila rasio yang dihasilkan kurang dari 1 menunjukkan capaian kinerja sasaran kurang efisien.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\% \text{ Keuangan 2023}}{\% \text{ Fisik 2023}} \times 100\%$$

Pengukuran progres Renstra adalah dengan membandingkan capaian selama periode Renstra dengan target pad Renstra periode 2020 - 2024. Persamaan yang digunakan adalah sbb:

$$\text{Capaian Renstra} = \frac{\Sigma \text{Realisasi 2020-2023}}{\text{Target 2020-2024}} \times 100\%$$



## Capaian Kinerja Berdasarkan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Pencapaian kinerja BPLHK Makassar yang berbasis DIPA BDLHK Makassar Tahun 2023 yang terdiri atas 5 (lima) indikator kinerja tercapai 100 persen seperti tersaji pada Tabel 4.

Tabel 5 :  
Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya kapasitas SDM LHK	Lulusan Diklat aparatur LHK	30 Orang	30 Orang	100
	Lulusan Diklat Non Aparatur LHK	60 Orang	120 Orang	100
	Jumlah lulusan pelatihan vokasi bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha	153 orang	153 orang	100
Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Diklat Kehutanan	Nilai KHDTK yang dikelola	69 poin	70,17 poin	101,69
Terbentuknya SDM yang berorientasi wirausaha kreatif bidang lingkungan hidup dan kehutanan	Jumlah SDM yang berorientasi wirausaha kreatif bidang lingkungan hidup dan kehutanan pada lembaga masyarakat dan komunitas	30 Orang	30 Orang	100



Tabel 6 :  
Efektifitas Kinerja Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Presentase Kinerja 2023	Presentase Kinerja 2022	Efektifitas	Kategori
1	Lulusan Diklat Aparatur LHK	100,00%	100,00%	1,00	Efektif
2	Lulusan Diklat Non Aparatur LHK	100,00%	100,00%	1,00	Efektif
3	Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha	100,00%	100,00%	1,00	Efektif
4	Nilai KHDTK yang dikelola	101,70%	117,64%	0,86	Tidak Efektif
5	Jumlah SDM yang berorientasi wirausaha kreatif bidang lingkungan hidup dan kehutanan pada lembaga masyarakat dan komunitas	100,00%	100,00%	1,00	Efektif
Efektifitas Rata - Rata		100,34%	103,53%	0,97	Tidak Efektif

Indikator Kinerja Kegiatan BDLHK Makassar memiliki rata-rata rasio efektifitas dengan nilai 1,00 kecuali pada Nilai KHDTK yang dikelola dengan nilai 0,86. Hal ini disebabkan karena penilaian dari Pusat Diklat SDM LHK yang memiliki perbedaan signifikan di Tahun 2022. Dengan demikian rata-rata efektifitas capaian kinerja BPLHK Makassar tahun 2023 adalah tidak efektif.

Tabel 7 :  
Efisiensi Kinerja Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Presentase Realisasi Anggaran 2023	Presentase capaian Kinerja 2023	Efisiensi	Kategori
1	Lulusan Diklat Aparatur LHK	100,00%	100,00%	1,00	Efisien
2	Lulusan Diklat Non Aparatur LHK	99,99%	100,00%	1,00	Efisien
3	Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha	99,98%	100,00%	1,00	Efisien
4	Nilai KHDTK yang dikelola	100,00%	101,70%	0,98	Efisien
5	Jumlah SDM yang berorientasi wirausaha kreatif bidang lingkungan hidup dan kehutanan pada lembaga masyarakat dan komunitas	100,00%	100,00%	1,00	Efisien
Efisiensi Rata-rata		99,99%	100,57%	0,99	Efisien

Indikator Kinerja Kegiatan BPLHK Makassar memiliki rata-rata rasio efisiensi dengan nilai 0,99. Hal ini berarti pada tahun 2023 BPLHK Makassar telah efisien dalam menggunakan anggaran untuk merealisasikan capaian kinerja.

Tabel 8 :  
Capaian Kinerja Berdasarkan Target Renstra 2020-2024

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra 2020-2024	Capaian Kinerja	% Progress Renstra	Realisasi IKK			
						2020	2021	2022	2023
1	Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia LHK	1. Lulusan Diklat Aparatur LHK	523	463	88,53%	373	30	30	30
		2. Lulusan Diklat Non Aparatur LHK	1,090	970	88,99%	416	374	120	60
		3. Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha	564	447	79,26%	-	204	90	153
		4. Nilai KHDTK yang dikelola	70	70,17	100,24%	60,7	68,82	80	70,17
2	Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah SDM yang berorientasi wirausaha kreatif bidang lingkungan hidup dan kehutanan pada lembaga masyarakat dan komunitas	450	330	73,33%	150	120	30	30

Renja Tahun 2023 merupakan renja keempat dalam periode renstra 2020-2024. Dalam laporan ini disajikan analisis target dan capaian mulai tahun 2020 - 2023. Capaian indikator ini melalui sumber dana DIPA sebesar 100 persen (lihat Tabel 2). Dengan menggunakan sumber dana DIPA dan kerjasama, tahun 2023 telah tercapai 86,7 persen sesuai yang tertuang dalam dokumen Rentsra BPLHK Makassar 2020-2024.

Pada indikator kinerja Lulusan Diklat Aparatur LHK dengan target Renstra sebesar 532 orang, capaian hingga saat ini sebesar 463 orang atau sudah mencapai 88,53 persen. Sedangkan Lulusan diklat non aparaturnya LHK sebesar 1090 orang pada tahun 2023 sudah mencapai 88,99% atau dengan jumlah IKK 970 orang. Lulusan pelatihan vokasi bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha target yang ditetapkan sebesar 564 orang kini sudah mencapai 447 orang atau sebesar 79,26 persen. Pada KHDTK, Indeks efektifitas dengan target 70 poin dapat dicapai sebesar 70,17 hingga 2023. Sedangkan untuk pelatihan pengembangan generasi lingkungan hidup dan kehutanan yang berorientasi wirausaha kreatif target sebesar 450 orang telah tercapai 330 orang atau sebesar 73,33%. Melihat data yang disajikan tabel diatas, maka BPLHK Makassar optimis untuk mencapai kinerja sesuai renstra.



Capaian Kinerja Berdasarkan Target pada Renstra 2020 - 2024 mencapai **86,07%** di tahun 2023

BLHK Makassar optimis dapat mencapai kinerja sesuai yang telah ditetapkan pada Renstra



Selain berbasis perjanjian kinerja, BPLHK Makassar juga melakukan analisis capaian berbasis rencana kerja (Renja) Tahun 2023. Rencana kerja umumnya berisi kegiatan dan indikator kinerja yang lebih luas dibandingkan basis penetapan kinerja. Dalam rencana kerja selain target-target indikator utama juga terdapat indikator pendukung antara lain layanan internal, terealisasinya pembayaran gaji dan tunjangan, terealisasinya biaya operasional perkantoran serta terlaksananya pemeliharaan bangunan bertingkat maupun tidak bertingkat di Kantor BPLHK Makassar dan di KHDTK Pelatihan Kehutanan Tabo-Tabo. Dengan menggunakan basis rencana kerja Tahun 2023 dengan sumber dana DIPA BPLHK Makassar dan skema kerjasama.

Satu hal pelajaran penting dalam pencapaian kinerja tersebut adalah bahwa kerjasama dapat meningkatkan kinerja organisasi. Kerjasama ini dalam rangka memenuhi kekurangan yang dimiliki organisasi atau kerjasama berperan sebagai *“fill in the gap”*. Pelajaran lainnya adalah bahwa secara kuantitas bisa tercapai 100 persen atau lebih, namun secara struktur bisa juga terjadi ketimpangan. Misalnya dalam kegiatan pelatihan, secara jumlah total SDM yang dapat ditingkatkan tercapai 100 persen atau lebih, namun dilihat dari kebutuhan jenis pelatihannya misalnya pelatihan teknis, fungsional, dan administrasi tidak semua tercapai 100 persen dan tidak seluruhnya aparatur dan non aparatur dalam wilayah layanan dapat terlayani. Hal ini dikarenakan alokasi anggaran yang terbatas, sehingga kegiatan yang prioritas yang mendapatkan alokasi. Jenis pelatihan yang teridentifikasi dalam penyusunan renja yang menggunakan pendekatan *bottom up* belum tentu menjadi prioritas nasional. Oleh karena itu, peran pelatihan dengan skema kerjasama atau penjaminan mutu didorong untuk mengisi kekurangan sumber daya tersebut, atau kerjasama berperan sebagai *“fill in the gap”*.

Capaian IKK pada Tahun 2023 sebesar 100,34 persen merupakan suatu keberhasilan ditengah terbatasnya anggaran. Prosentase tersebut turun 3,53 persen dibanding tahun 2022 yang sebesar 103,53 persen, dikarenakan hasil penilaian efektifitas KHDTK Tahun 2022 dan 2023 yang berbeda. Namun dari segi capaian IKK Pelaksanaan Pelatihan tercatat naik dari 270 orang pada 2022 dan 273 orang pada 2023. Penilaian efektifitas KHDTK menjadi pengaruh yang signifikan pada total penilaian efektifitas kinerja BPLHK Makassar, sebab poin penilaian pada 2022 mempengaruhi penilaian pada 2023.

Walaupun demikian, hal tersebut secara keseluruhan IKK BPLHK Makassar dapat tercapai bila dilihat dari segi ketercapaian Perjanjian Kinerja. Pun bila mengambil perspektif capaian Renstra 2020-2024, capaian sebesar 86,07 persen hingga tahun 2023 semakin membuat optimis target pada Renstra dapat tercapai dengan baik di Tahun 2024.

Adapun keberhasilan capaian IKK BPLHK Makassar tidak lepas dari dukungan Badan P2SDM, Pusat Diklat SDM LHK, Pusat Pengembangan Generasi LHK, serta koordinasi yang baik dengan seluruh stakeholder wilayah layanan. Koordinasi dengan kelompok masyarakat, maupun pegawai BPLHK Makassar, serta tersedianya tenaga pengajar yang memadai dalam melaksanakan pelatihan merupakan faktor pendukung keberhasilan BPLHK Makassar.

Kendala yang dihadapi sepanjang Tahun 2023 seperti kurangnya pilihan pada SDM yang memfasilitasi kegiatan balai. Dari faktor pendukung dan penghambat tersebut, telah dilakukan upaya-upaya peningkatan kapasitas SDM internal dengan melakukan studi banding pada beberapa instansi KLHK maupun mengikutkan pada pelatihan baik secara daring maupun luring.

Indikator pertama tersebut dicapai melalui penyelenggaraan pelatihan sebanyak 10 (sepuluh) jenis pelatihan dengan jumlah peserta sebanyak 273 orang. Rincian pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan di BPLHK Makassar tahun 2023 disajikan pada Tabel 5.

Tabel 9 :  
Penyelenggaraan Pelatihan Sumber Dana DIPA BPLHK Makassar Tahun 2023

<b>NO.</b>	<b>JENIS PELATIHAN</b>	<b>JUMLAH PESERTA</b>	<b>TANGGAL PELAKSANAAN</b>
<b>DIKLAT APARATUR LHK</b>			
1.	PEMBENTUKAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	30 Orang	12 s.d 24 September 2023
<b>DIKLAT NON APARATUR LHK</b>			
2.	PEMBUATAN PUPUK BOKASHI	30 Orang	7 s.d 11 Juni 2023
3.	PEMANDU WISATA ALAM	30 Orang	7 s.d 11 Juni 2023
<b>PELATIHAN VOKASI</b>			
4.	PEMASARAN PRODUK MULTIUSAHA KEHUTANAN	30 Orang	29 Maret - 2 April 2023
5.	USAHA BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN JAMUR TIRAM	30 Orang	21 s.d 25 Juni 2023
6.	TEKNIK PEMBUATAN MINYAK ATSIRI SERAI WANGI	30 Orang	17 s.d 21 Mei 2023
7.	TEKNIK PEMBUATAN ASAP CAIR/ CUKA KAYU DAN BRIKET ARANG	30 Orang	7 s.d 11 Juni 2023

Tabel 10 :  
Realisasi Pelatihan Kerjasama yang masuk pada IKK Pelatihan Vokashi Tahun 2023

<b>NO.</b>	<b>JENIS PELATIHAN</b>	<b>JUMLAH PESERTA</b>	<b>TANGGAL PELAKSANAAN</b>
1.	Pelatihan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Pengujian Kayu Gergajian	8 Orang	8 s/d 24 Februari 2023
2.	Pelatihan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Pengujian Kayu Bulat	11 Orang	8 Februari - 2 Maret 2023
3.	Pelatihan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Perencanaan Hutan	13 Orang	21 Maret - 1 April 2023

Selain melalui anggaran DIPA BPLHK Makassar, pelatihan juga dilaksanakan dengan menggunakan skema kerjasama atau jaminan mutu. Pelatihan melalui skema ini terealisasi 9 (sembilan) orang yang seluruhnya berasal dari PEH pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulbar. Pelatihan dilaksanakan selama 15 hari. Dengan demikian jumlah total SDM aparatur dan non aparatur yang meningkat kapasitasnya melalui pelatihan yang diselenggarakan di BPLHK Makassar berjumlah 282 orang. Jika dihitung dengan menggunakan basis ini, maka realisasi indikator kinerja pertama adalah sebesar 100 persen. Jenis pelatihan dan jumlah SDM bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang dapat ditingkatkan melalui skema kerjasama atau jaminan mutu secara rinci disajikan pada Tabel 10 di atas.

Pelajaran penting dari penyelenggaraan pelatihan pada tahun 2023 adalah pelatihan lebih banyak dilaksanakan dengan metode klasikal *onsite* khususnya pelatihan vokasi. Metode ini merupakan bentuk adaptasi terhadap anggaran yang terbatas dengan memanfaatkan jejaring pada stakeholder wilayah layanan. Selain itu, metode ini juga lebih relevan dengan kebutuhan para peserta langsung mengingat jenis pelatihan yang dilaksanakan merupakan pelatihan berbasis wirausaha kreatif. Metode ini lebih produktif dalam arti BPLHK Makassar dapat langsung terjun di lapangan mendengar aspirasi internal, menembus sekat geografis antara pengajar dan peserta, serta memahami kebutuhan dan potensi langsung kaitannya dengan wirausaha kreatif.

*Outcome* dari penyelenggaraan pelatihan aparatur dan non aparatur LHK ini adalah meningkatnya SDM Lingkungan hidup dan kehutanan yang berorientasi industri dan wirausaha sehingga diharapkan setelah mengikuti pelatihan, peserta dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam dunia usaha.

### Nilai KHDTK yang Dikelola (69 poin)

Indikator kinerja kedua dalam perjanjian kinerja adalah Nilai KHDTK yang Dikelola sebesar 69 poin. Setelah dilakukan validasi oleh tim penilai KHDTK pada Pusat Diklat SDM LHK melalui *self assesment* secara kuantitatif tercapai 101,69 persen yakni 70,17 poin.

Realisasi kegiatan ini berupa :

1. Penyusunan RPHJPD KHDTK Tahun 2024
2. Penyusunan SOP/Desain Tapak Pemanfaatan Jasa Lingkungan
3. Pengembangan Sarana Diklat Bidang Eco-Edu-tourism dan Pusat Informasi KHDTK
4. Pemeliharaan KHDTK Diklat Kehutan-an Bersama Masyarakat
5. Sarana Pemeliharaan Satwa Dan Dome Kupu-Kupu
6. Sarana Demplot Rehabilitasi dan KTA
7. Pemanfaatan Sarana Produksi Gula Semut dan Jamur Tiram Bersama-Masyarakat
8. Pengembangan Kerjasama Pengeloaan KHDTK
9. Pengembangan Kegiatan Kaji Widya
10. Pemeliharaan Batas Blok dan Petak
11. Perlindungan dan Pengamanan KHDTK Bersama Masyarakat
12. Penyuluhan dan Peningkatan Peran Masyarakat Sekitar KHDTK
13. Penguatan Kapasitas Kelompok Tani Hutan
14. Administrasi dan pelaporan
15. Monev dan pelaporan

Pengelolaan KHDTK sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri LHK No. 7 Tahun 2021 Pasal 448 meliputi 6 kegiatan, yaitu: (1) perencanaan KHDTK; (2) pelaksanaan kegiatan KHDTK, (3) kerjasama

pengelolaan KHDTK; (4) pemanfaatan hutan pada areal KHDTK; (5) pembangunan sarana dan prasarana pendukung KHDTK; dan (6) pelaporan pengelolaan KHDTK. Selanjutnya sebagaimana mandat Pasal 449 Permen LHK No. 7 Tahun 2021, pengelola KHDTK wajib melaksanakan: (1) perlindungan hutan untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan lingkungan; (2) konservasi hutan dan keanekaragaman hayati; (3) rehabilitasi hutan; (4) pemeliharaan batas areal KHDTK; (5) koordinasi pengelolaan KHDTK dengan instansi yang menangani kehutan-an setempat; dan (6) melaksanakan pelaporan pengelolaan KHDTK.

Sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kemajuan pengelolaan KHDTK adalah nilai efektivitas pengelolaan KHDTK. Pada tahun 2023, target kinerja pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan Tabo-Tabo adalah meningkatkan efektivitas pengelolaan KHDTK sebesar 70 poin. Penilaian kinerja pengelolaan KHDTK diarahkan pada pencapaian kinerja pengelolaan KHDTK pada 6 (enam) kriteria yaitu: (1) Perencanaan KHDTK dengan bobot 15%, (2) Pelaksanaan Kegiatan KHDTK dengan bobot 30%, (3) Kerjasama Pengelolaan KHDTK bobot 10% dan (4) Pemanfaatan Hutan Pada Areal KHDTK dengan bobot 30% (5) Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung KHDTK dengan bobot 10%, dan (6) Pelaporan Pengelolaan KHDTK dengan bobot 5%.

*Outcome* pada pengelolaan KHDTK adalah meningkatnya efektivitas pengelolaan KHDTK yang berdampak pada kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan.





*Jumlah SDM yang berorientasi wirausaha kreatif bidang lingkungan hidup dan kehutanan pada lembaga masyarakat dan komunitas (30 Orang)*

Indikator kinerja ketiga adalah Jumlah SDM yang berorientasi wirausaha kreatif bidang lingkungan hidup dan kehutanan pada lembaga masyarakat dan komunitas. Pencapaian kinerja ini dilakukan melalui kegiatan pelatihan masyarakat dan komunitas lingkungan hidup dengan jumlah peserta diklat sebanyak 30 orang / 1 angkatan pelatihan. Capaian indikator kinerja ketiga ini telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu 30 orang atau 100 persen. Rincian pelaksanaan pelatihan pengembangan generasi lingkungan hidup dan kehutanan di BPLHK Makassar tahun 2023 tersaji pada Tabel 11.

Tabel 11 :

Realisasi penyelenggaraan bimbingan teknis pengembangan generasi lingkungan hidup dan kehutanan pada Tahun 2023

<b>NO.</b>	<b>JENIS BIMBINGAN TEKNIS</b>	<b>JUMLAH PESERTA</b>	<b>TANGGAL PELAKSANAAN</b>
1.	PENGELOLAAN SAMPAH UNTUK BUDIDAYA MAGGOT LALAT TEN-TARA HITAM	30 Orang	8 s/d 24 Februari 2023

Outcome pada IKK ini adalah membentuk wirausaha kreatif bidang lingkungan hidup dan kehutanan pada lembaga masyarakat dan komunitas khususnya pada pengelolaan sampah untuk budidaya maggot. Selain menjaga lingkungan, pengelolaan sampah untuk budidaya maggot merupakan peluang wirausaha bagi masyarakat.





Anggaran BPLHK Makassar pada tahun 2023 adalah sebesar Rp.10.805.424.000,- Jumlah anggaran ini mengalami peningkatan sebesar 1,8 persen dibandingkan anggaran tahun 2022 yang sebesar Rp. 10.612,300,000,-. Anggaran tahun 2023 jika dipilah berdasarkan jenis akunnya terdiri atas 50,49 persen merupakan belanja pegawai, 46,46 persen belanja barang, dan 3,05 persen belanja modal. Alokasi anggaran per rincian output pada DIPA BPLHK Makassar Tahun 2023 dapat di lihat pada Tabel 12.

Tabel 12 :  
Alokasi Anggaran per Rincian Output Tahun 2023

Kode	Uraian	Rincian Output		Pagu	Persentase
				Rp	%
238073	Pagu Satker BDLHK Makassar			10,805,424,000	
6745	Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia LHK			1,215,000,000	11,24
6745.CAG.001	Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat	1	UNIT	375,000,000	3,47
6745.DCE.001	Pelatihan SDM Aparatur LHK yang ditingkatkan	30	ORANG	120,000,000	1,11
6745.SCE.001	Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang ditingkatkan	60	ORANG	240,000,000	2,22
6745.SCE.002	Pelatihan Vokasi tenaga teknis bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha	153	ORANG	480,000,000	4,44
6747	Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan			75,000,000	0,69
6747.BDC.001	SDM yang Berorientasi Wirausaha Kreatif Lingkungan Hidup dan Kehutanan	30	ORANG	75,000,000	0,69
5439	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM			9,515,424,000	88,06
5439.EBA.962	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	Layanan	90,000,000	0,83
5439.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan	9,095,424,000	84,17
5439.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	1	UNIT	330,000,000	3,05

Alokasi belanja pegawai merupakan yang terbesar bila dipilah berdasarkan jenis belanja. Total alokasi untuk belanja pegawai adalah sebesar Rp. 5,455,424,000 atau 50,49%. selanjutnya alokasi belanja barang tercatat sebesar Rp. 5.020.000.000,- atau sebesar 46,46%. Sedangkan belanja modal tercatat sebesar Rp. 330.000.000,- atau 3,05%. Alokasi anggaran per jenis belanja disajikan pada Tabel 13.

Tabel 13 :  
Alokasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2023

Jenis Belanja	Pagu (Rp.)	%
Pegawai	5,455,424,000	50,49
Barang	5,020,000,000	46,46
Modal	330,000,000	3,05
<b>Total</b>	<b>10,805,424,000</b>	<b>100</b>

Total anggaran (Pagu) pada BPLHK Makassar tahun 2023 adalah sebesar Rp10,805,424,000,- (Sepuluh milyar delapan ratus lima juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 10,803,689,056,- (Sepuluh milyar delapan ratus tiga juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima puluh enam rupiah) atau sebesar 99,98% dengan fisik capaian kinerja sebesar 100 persen. Realisasi anggaran tahun 2023 lebih tinggi 0,02 persen dibanding tahun 2022. Grafik capaian anggaran BPLHK Makassar tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 4 dan Gambar 5.



Gambar 4 : Grafik Capaian Kinerja Keuangan Tahun 2023



Gambar 5: Grafik Capaian Kinerja Keuangan Per Rincian Output Tahun 2023

Secara umum pencapaian indikator kinerja kegiatan yang tertuang dalam perjanjian kinerja pada BPLHK Makassar tahun 2023 yang berbasis DIPA secara kuantitatif mencapai 100 persen. Realisasi keuangan mencapai 99,98 persen. Namun disadari masih terdapat kelemahan dari capaian secara struktur.

Sebagai pembelajaran (*lesson learned*) adalah perlu penyusunan perencanaan yang selaras antara rencana strategis, rencana kerja tahunan, dan penetapan kinerja pada berbagai tingkatan. Merumuskan indikator kinerja yang lebih tajam yang mampu memberi gambaran terhadap perkembangan kondisi yang diharap-

kan, dengan pendekatan SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*), artinya indikator kinerja yang kita rumuskan bersifat spesifik mampu menggambarkan apa yang akan diraih, dapat diukur, dapat dicapai dengan sumberdaya yang tersedia, sesuai dengan tupoksi, dan memiliki target waktu yang jelas.

Pembelajaran selanjutnya adalah peran penting kerjasama atau kerja bersama (*colective action*) dalam meningkatkan pencapaian kinerja. Di tengah keterbatasan, BPLHK Makassar mampu mencapai target kinerja dengan baik, Tuntutan perlunya kerja bersama ini juga dalam rangka adaptasi terhadap perkembangan dunia yang penuh ketidakpastian, kompleksitas, volatilitas, dan ambiguitas. Kondisi ini diperlukan kemampuan bekerja bersama, kerja kreatif, dan kerja cepat. Mau tidak mau kemampuan kerja bersama harus makin diasah karena era ketidakpastian tidak bisa dihadapi sendirian.

“

***Collective action adalah gerakan bersama secara sistematis dan terukur yang fokus pada satu tujuan dan kepentingan bersama***

## BAB 4

# PENUTUP

Secara umum pencapaian indikator kinerja kegiatan BPLHK Makassar tahun 2023 secara kuantitatif mencapai 100 persen dengan realisasi keuangan sebesar 99,98 persen. Capaian kinerja BPLHK Makassar ini dicapai secara efisiensi dan efektif. Capaian ini cukup memuaskan ditengah keterbatasan anggaran. Kegiatan BPLHK Makassar pada tahun 2023 fokus pada jenis-jenis pelatihan vokasi yang berorientasi industri dan wirausaha.

Laporan kinerja ini merupakan bagian dari evaluasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar, yang diharapkan akan dapat lebih meningkatkan kinerja capaian sasaran berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat untuk pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan khususnya wilayah pelayanan agar dapat memberikan dampak terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan secara lestari serta masyarakat sejahtera.

.....



## CAPACITY BUILDING

Peningkatan kapasitas pegawai BPLHK Makassar di Malino, Kab. Gowa.





## KERJASAMA PELATIHAN

Acara penutupan pelatihan Fungsional PEH Ahli kerjasama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat. Pelatihan ini dilaksanakan dari tanggal 02 - 12 Oktober 2023.



## LAMPIRAN



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : Ir. Daniel Lebang, MM

**Jabatan** : Kepala Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar  
selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama** : Drs. A. Palguna Ruteka

**Jabatan** : Plt. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut akan melaksanakan pengawasan melekat berjenjang, internalisasi revolusi mental serta mendorong dan membangun generasi berwawasan lingkungan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Desember 2022

Pihak Kedua,

**Drs. A. Palguna Ruteka**  
NIP. 19650924 199303 1 001

Pihak Pertama,

**Ir. Daniel Lebang, MM**  
NIP. 19650622 199203 1 003

**TARGET TRIWULAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BALAI PELATIHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN MAKASSAR**

No. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (3)	Target (4)	B03 (5)	B06 (6)	B09 (7)	B12 (8)
1.	Meningkatnya Kapasitas SDM dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Lulusan Diklat Aparatur LHK	30 orang	-	30 orang	30 orang	30 orang
2.		Lulusan Diklat Non Aparatur LHK	60 orang	30 orang	60 orang	60 orang	60 orang
3.		Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha	120 orang	-	90 orang	120 orang	120 orang
4.	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Diklat Kehutanan	Nilai KHDTK yang Dikelola	69 poin (1 unit)	-	-	-	69 poin (1 unit)
5.	Terbentuknya SDM yang berorientasi wirausaha kreatif bidang lingkungan hidup dan kehutanan	Jumlah SDM yang Berorientasi Wirausaha Kreatif Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Lembaga Masyarakat dan Komunitas	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang

Catatan:

B03 : Target Triwulan I

B06 : Target Triwulan II

B09 : Target Triwulan III

B12 : Target Triwulan IV

Jakarta, 20 Desember 2022



Ir. Daniel Lebang, MM

NIP. 19650622 199203 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BALAI PELATIHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN MAKASSAR**

No.	Sasaran Kegiatan (1)	Indikator Kinerja Kegiatan (2)	Target (4)
1.	Meningkatnya Kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Lulusan Diklat Aparatur LHK Lulusan Diklat Non Aparatur LHK Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirasaha	30 orang 60 orang 120 orang
2.	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Diklat Kehutanan	Nilai KHDTK yang Dikelola	69 poin (1 unit)
3.	Terbentuknya SDM yang berorientasi wirasaha kreatif bidang lingkungan hidup dan kehutanan	Jumlah SDM yang Berorientasi Wirasaha Kreatif Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Lembaga Masyarakat dan Komunitas	30 orang

**No. Program/Kegiatan**

**Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**

1. Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK

Anggaran  
Rp1.360.000.000,-

2. Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Program Dukungan Manajemen**

3. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM.

Rp9.928.158.000,-

Pihak Kedua,



Drs. A. Palguna Ruteka  
 NIP. 19650924 199303 1 001

Jakarta, 20 Desember 2022  
 Pihak Pertama,



Ir. Daniel Lebang, MM  
 NIP. 19650622 199203 1 003



## PERJANJIAN KINERJA REVISI TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*outcome*), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : Dr. Muhammad Arif Muhammadiyah, S.Hut., M.Si.

**Jabatan** : Pjt. Kepala Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar  
selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama** : Drs. A. Palguna Ruteka

**Jabatan** : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut akan melaksanakan pengawasan melekat berjenjang, internalisasi revolusi mental serta mendorong dan membangun generasi berwawasan lingkungan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 November 2023

Pihak Kedua,

**Drs. A. Palguna Ruteka**  
NIP. 19650924 199303 1 001

Pihak Pertama,

**Dr. Muhammad Arif Muhammadiyah, S.Hut., M.Si.**  
NIP. 19720412 200003 1 003

**PERJANJIAN KINERJA REVISI TAHUN 2023**  
**BALAI PELATIHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN MAKASSAR**

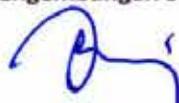
No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia LHK	Meningkatnya Kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Lulusan Diklat Aparatur LHK	30 orang
2.			Lulusan Diklat Non Aparatur LHK	60 orang
3.			Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha	153 orang
4.		Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Diklat Kehutanan	Nilai KHDTK yang Dikelola	69 poin
5.	Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Terbentuknya SDM yang berorientasi wirausaha kreatif bidang lingkungan hidup dan kehutanan	Jumlah SDM yang Berorientasi Wirausaha Kreatif Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Lembaga Masyarakat dan Komunitas	30 orang

Klasifikasi Rincian Output (KRO)/Rincian Output (RO)

Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Target RO	Anggaran (Rp)
DCE-Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pelatihan SDM Aparatur Ditingkatkan	30 orang	120.000.000
SCE-Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pelatihan SDM Non Aparatur Ditingkatkan	60 orang	240.000.000
	Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK yang berorientasi Industri dan Wirausaha	153 orang	480.000.000
CAG-Sarana Bidang, Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat	1 unit	375.000.000
BDC-Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat	SDM yang berorientasi wirausaha kreatif Lingkungan Hidup dan Kehutanan	30 orang	75.000.000
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	1 Layanan	9.095.424.000
	Layanan Umum	1 Layanan	90.000.000
EBB- Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Prasarana Internal	1 Paket	330.000.000
<b>TOTAL</b>			<b>10.805.424.000</b>

Jakarta, 15 November 2023

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM



Drs. A. Palguna Ruteka  
NIP. 19650924 199303 1 001

Pt. Kepala Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar



Dr. Muhammad Arif Muhammadiyah, S.Hut., M.Si.  
NIP. 19720412 200003 1 003

**RENCANA AKSI REVISI TAHUN 2023**  
**BALAI PELATIHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN MAKASSAR**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Anggaran (Rp)	Target	Satuan	Target Output Bulanan													
						Jan	Feb	Mar	April	Mai	Jun	Juli	Ag	Sep	Ok	Nov	Des		
Meningkatnya Kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Lulusan Diklat Aparatur LHK	Pelatihan SDM Aparatur Ditingkatkan	120.000.000	30	Orang	-	-	-	-	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Lulusan Diklat Non Aparatur LHK	Pelatihan SDM Non Aparatur Ditingkatkan	240.000.000	60	Orang	-	-	-	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha	Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK yang berorientasi Industri dan Wirausaha	480.000.000	153	Orang	-	-	120	120	120	120	153	153	153	153	153	153	153	153
Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Diklat Kehutanan	Nilai KHDTK yang Dikelola	Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat	375.000.000	69 (1)	Poin (Unit)	-	-	-	-	-	69 (1)	69 (1)	69 (1)	69 (1)	69 (1)	69 (1)	69 (1)	69 (1)	
	Jumlah SDM yang Berorientasi Wirausaha Kreatif Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Lembaga Masyarakat dan Komunitas	SDM yang berorientasi wirausaha kreatif Lingkungan Hidup dan Kehutanan	75.000.000	30	Orang	-	-	-	-	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Terbentuknya SDM yang berorientasi wirausaha kreatif bidang lingkungan hidup dan kehutanan	Jumlah SDM yang Berorientasi Wirausaha Kreatif Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Lembaga Masyarakat dan Komunitas	SDM yang berorientasi wirausaha kreatif Lingkungan Hidup dan Kehutanan	75.000.000	30	Orang	-	-	-	-	30	30	30	30	30	30	30	30	30	

Jakarta, 15 November 2023

**Plt. Kepala Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar**

**Dr. Muhammad Arif Muhammadiyah, S.Hut., M.Si.**  
**NIP. 19720412 200003 1 003**



Scan this QR Code

<http://bdlhkmakassar.bp2sdm.menlhk.go.id>

Follow sosial media kami :



Balai Pelatihan LHK  
Makassar



bdlhkmakassar



Balai Diklat LHK  
Makassar